

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi.
- Abidin, Zainal. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jamil. 2015. *Al-Qur'an Tajwid Terjemah Perkata, Terjemah Bahasa Inggris*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Anwar, Zainal. 2015. Pemikiran Ushul Fiqih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah, *Jurnal Fitrah Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 1, No. 1*.
- Arifin. 2015. Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional dan Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1, Vol. 3.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at Adam. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimmly. 2011. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aulia, Nabiella. 2021. Analisis Fikih Siyasah Terhadap Harmonisasi Legislasi Hukum Di Indonesia. Skripsi Tidak Diterbitkan..
- Djazuli, A. 2003. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice*, (Lampung: Luduny Alifatama, 2021) hal. 27.
- Farida, Maria. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Felisiani, Theresia. "Kasus Pasutri Bawa Anak Curi Tabung Gas 3kg Diselesaikan Secara Restorative Justice", dalam <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/11/01/kasus-pasutri-bawa-anak-curi-tabung-gas-3-kg-di-senen-bisa-diselesaikan-secara-restorative-justice>, diakses pada tanggal 4 februari 2023.
- Fiki, Muhammad dan Sunny Ummul. 2022. Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 1, No. 1.

- Fransiscus, Rolando. “Komjen Sigit Tegaskan Kasus Nenek Minah Tak Boleh Terulang”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-5341099/komjen-sigit-tegaskan-kasus-nenek-minah-tak-boleh-terulang>, diakses pada tanggal 4 februari 2023.
- fuady, Munir. 2012. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Media.
- Ghani, Hakim. “Tangis Comara Yang Curi Hp Demi Anak Terima Bantuan Dari Jaksa”, dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5806357/tangis-comara-yang-curi-hp-demi-anak-terima-bantuan-dari-jaksa>, diakses pada tanggal 4 februari 2023.
- Goesniadhie, Kusnu. *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Malang: Nasa Media.
- Hamzah, Andi. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanitijo, Ronny. 1999. *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*. Semarang: Bagian Hukum Dan Masyarakat UNDIP.
- Hotmaulana, Rufinus. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Ni'matul. 2011. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Prenada media.
- I. C Van. 2005. *Buku Pegangan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet. I*. Jakarta: Radar Jaya Pratama.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2006) hal. 109.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 14.
- Mahmud, Moh. 2010. *Konstitusi Dan Huum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Manan, Bagir. 2008. *Restorative Justice Suatu Perkenalan Dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 1998. *An Introduction To Indonesian Law*. Malang: Intrans Publishing.
- Masoga, Ghaos. 2021. Kedudukan Kepolisian Dalam Struktur Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram*.
- Mubarak, Jaih. 2002. *Kaidah Fiqih: Sejarah Dan Kaidah Asasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Mujid, Abdul. 1994. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*. Bandung: Pt. Alumni.
- Mutiara. 2017. Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam. *Jurnal Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, UIN Ar Raniry, Vol. 2, No. 1*.
- Nawawi, Barda dan muladi. 1984. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Novita, Risky Dian. 2014. Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentag Kebebasan Hakim. *Jurnal Ilmiah, Malang, Universitas Brawijaya*.
- Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Prakoso, Djoko. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

Prayitno, Kuart Yudi. 2012. Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto), *Jurnal : Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 3*.

Purnomo, Kudus. "Saat Keadilan Restoratif Menyelamatkan Orang-Orang Kecil Dari Jeruji", dalam <https://www.alinea.id/nasional/saat-keadilan-restoratif-menyelamatkan-orang-orang-kecil-b2fgG9Cb1> , yang diakses pada tanggal 4 februari 2023.

Rahmadani, Lidya Dkk. 2015. Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *USU Law Journal, Vol. 3. No. 3*.

Rapung. 2013. *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik*. Jakarta: Gozian Press.

Ribut, Edi. 2021. *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. Lampung: Cv. Laduny Alifatama.

Setyowati, Dewi. 2020. Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan, *Pandecta, Volume 15, Number 1*.

Sholehhudin, M. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta: Rajawali Press.

- Siregar, Mahmud Dkk. 2007. *Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam*. Medan: Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak.
- Soekaanto, Soerjono dan Sri. 1990. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiarni, Endang. 2013. *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Statistik*. Yogyakarta: UAYJ Press..
- Syarif, Ibnu Dkk. 2008. *Fiqih Siyasa: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Tahir, Heri. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang.
- Teguh, Bagus dan Sadjijono. 2017. *Hukum Kepolisian Di Indonesia: Studi Kekuasaan Dan Rekontruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*. Surabaya: Laksbang Pressindo.
- Tirta, Ilham. “Eks Guru Honorer di Garut Jadi Tersangka Kasus Pembakaran Sekolah”, dalam <https://www.republika.co.id/berita/r6a1ev485/eks-guru-honorer-di-garut-jadi-tersangka-kasus-pembakaran-sekolah>, diakses pada tanggal 4 februari 2023.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wandasari, Shandra Lisyia. 2013. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana, *Unnes Law Journal* 2 (2).